

## Pertumbuhan Ekonomi Masih Bergantung Pada Bahan Bakar Fosil

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia menjadi tuan rumah peluncuran Laporan Pembangunan Manusia Asia Pasifik/Asia Pacific Human Development Report/APHDR) oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Program Pembangunan/United Nations Development Program (UNDP). Laporan bertajuk One Planet To Share itu memfokuskan perhatian pada kekhawatiran akan ancaman dampak perubahan iklim yang mengancam kawasan Asia Pasifik. UNDP merekomendasikan negara-negara di kawasan ini menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi karbon.

Dalam sambutannya, Direktur Regional UNDP-Asia Pasifik, Dr. Ajay Chhibber mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Di antaranya penggunaan lebih dari 80 persen batubara industri dunia. Sekitar 85 persen energi yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil berupa batubara, gas, dan minyak bumi. "Negara-negara Asia bertanggung jawab atas 37 persen emisi dunia dari produksi pertanian, termasuk melalui pertanian peternakan, perubahan guna lahan dan deforestasi," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/5).

Pada kesempatan itu, hadir Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan perwakilan diplomatik negara-negara sahabat. Ajay memaparkan bahwa kawasan ini adalah rumah bagi negara-negara industri baru yang tengah tumbuh seperti China, India, dan Indonesia. Namun, di sisi lain, kawasan ini juga adalah tempat di mana ketimpangan kesejahteraan sangat mencolok.

Dalam laporan itu, UNDP merekomendasikan delapan kebijakan yang ditempuh negara-negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya yaitu transisi menuju teknologi industri, teknologi pertanian, dan pembangkit listrik yang rendah emisi. "Malaysia telah menargetkan pembangunan sumber energi terbarukan sebanyak 5,5 persen pada tahun 2015 dengan memberikan insentif," katanya.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menginstruksikan kepada anggota Kabinet untuk menjadikan Laporan UNDP tersebut sebagai salah satu landasan perumusan kebijakan. Ia juga mengumumkan bahwa mulai Juni, Indonesia akan segera merilis produksi mobil hybrid dalam rangka pengurangan emisi. Selain meluncurkan mobil hybrid, pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan pengendalian konsumsi BBM.

Sebagai bagian dari komitmennya untuk menurunkan emisi, Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 26% pada tahun 2020 atau 41% jika dengan bantuan internasional. Presiden menjelaskan, Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan, yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah pada pengelolaan pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. "Kita gulirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, untuk dimanfaatkan bagi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, dalam upaya mempercepat penurunan emisi karbon, sejak tahun 2010 pemerintah melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2020. RAN GRK 2020 ini saya tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011, sebagai pedoman dalam pengelolaan semua sektor pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Secara khusus, untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah juga menerapkan skem Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD +) di seluruh pelosok tanah air, melalui pelaksanaan Strategi Nasional REDD+. Berbagai instrumen REDD+ yang meliputi kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta sistem untuk pengukuran, pelaporan dan verifikasi---measurement, reporting, and verification (MRV)---terus kita sempurnakan. "Saya gembira, pelaksanaan skem REDD+ telah diapresiasi UNDP dan dijadikan sebagai salah satu Indonesian Specific Highlights pada laporan tahun 2012 ini," katanya.